

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten

Jalan Syech Nawawi Al Bantani Blok Instansi Vertikal No.01 Serang 42171

Telp. (0254) 8480080 - Fax. (0254) 8480083 Serang 42171

Website: <http://banten.kemenag.go.id> email : kanwilbanten@kemenag.go.id

KATA PENGANTAR



Dr. H. A. BAZARI, M.Pd.I.

أَلْحَمُّدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْكَامِلِينَ، وَأَمَرْنَا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الصَّادِقَ الْوَعْدِ الْأَمِينُ. أَمَا بَعْدُ.

Segala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Rivieu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama yang merupakan implementasi dari Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan umat Islam "rahmatan lil'alamin", Nabi Muhammad SAW.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan Menteri Negara Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi Kementerian Agama Provinsi Banten menjadi birokrasi bersih, melayani sebagaimana harapan masyarakat dengan landasan lima nilai budaya kerja Kementerian Agama. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, untuk secara

konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

LKj Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 2020 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja dan realisasi serapan anggaran yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020, hal ini disusun semata-mata untuk menunjukkan kepada masyarakat, bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), baik berupa output maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu ***“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”***.

Semoga laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten Tahun 2020 dapat menjadi media pertanggungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang

Serang, 15 Februari 2021
Kepala Kanwil Kemenag
Propinsi Banten



D. H. A. BAZARI, M.Pd.I
NIP. 196404031991031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kementerian Agama RI mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pertama RPJMN 2015-2019 yaitu reformasi birokrasi dan tatakelola. Untuk itu, seluruh program kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah menetapkan 5 (Lima) dan 54 Sasaran Kegiatan berdasarkan RKAK/L yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, dengan mengaplikasikan indikator kinerja sasaran kegiatan sesuai target kinerja.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2020, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dapat dinilai "berhasil" dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dan tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020, tentunya dalam bentuk laporan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Keberhasilan ini merupakan suatu bentuk kerja nyata dan keseriusan seluruh *stakeholder* Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam mengemban amanat Visi dan Misi Kementerian Agama.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari delapan program strategis yang ditetapkan dalam RKAK/L Tahun 2020, terdapat 8 (delapan) Program Kerja yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik yakni rata-rata (95,92%) dengan rincian : Program Sekretariat Jenderal (99,31%), Program Bimbingan Masyarakat Islam (89,66%), Program Pendidikan Islam (96,62%), Program Bimbingan Masyarakat Kristen (97,00%), Program Bimbingan Masyarakat Katolik (90,50%), Program Bimbingan Masyarakat Hindu (97,31%), Program Bimbingan Masyarakat Budha (98,34%) dan Program Penyelenggaraa Haji dan Umrah (98,61%).

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN**



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H.A BAZARI, M.Pd.I
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : PROF. DR.H.NUR KHOLIS SETIAWAN
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik
Indonesia

Selaku atasan langsung yang selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, Januari 2020

Menyetujui
Pihak Kedua

Pihak Pertama

PROF. DR.H.NUR KHOLIS SETIAWAN
NIP. 196911101994031005

Dr. H.A BAZARI, M.Pd.I
NIP.196404031991031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
PERJANJIAN KINERJA	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
D. Aspek Strategis	8
E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	9
F. Struktur Organisasi	11
G. Kekuatan Sumber Daya Manusia	15
H. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	18
B. Rencana Kerja Tahunan	25
C. Penetapan Kinerja Tahun 2020	40
D. Indikator Kinerja Utama	58
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	63
B. Perbandingan dan Analisis Capaian Kinerja	93
C. Perbandingan dan Analisis RPJM	100
D. Analisis Keberhasilan	129
E. Analisis Kegagalan	135
F. Evaluasi dan Capaian Realisasi Anggaran	137
G. Perbandingan Capaian Anggaran 2020-2024	188
BAB IV PENUTUP	

A. Kesimpulan	192
B. Saran	143

LAMPIRAN

1. Penetapan Kinerja POK RKAK/L 2020
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020
3. Penetapan Kinerja POK RKAK/L Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moderasi kehidupan beragama menjadi salah satu tujuan utama Kementerian Agama yang memiliki kedudukan dan peran penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai amanat konstitusi. Membangun dan menciptakan masyarakat yang menjalankan kehidupan beragama yang moderat menjadi tanggungjawab berat namun harus dijalankan dengan kerja keras yang berintegritas dalam rangka mencapai tujuan mulia sesuai dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama falsafah Negara Pancasila merupakan fundamen moral bernegara yang harus dimaknai lebih lanjut sebagai unsur yang harus berperan dan menjiwai arah dan tujuan pembangunan nasional yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan visi "Indonesia yang Rukun, Mandiri, Maju, Adil dan Makmur".

Kementerian Agama sebagaimana termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang religius, taat .

Asas lima nilai budaya kerja yang dicanangkan oleh Menteri Agama menjadi tumpuan penting bagi seluruh aparatur dan stake holder di Lingkungan Kementerian Agama dalam mengimplementasikan Visi Misi dan amanah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Kementerian Agama dituntut untuk melaksanakan tugas di bidang agama dengan bijaksana, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dalam mewujudkan hal tersebut dan sesuai azas akuntabilitas, penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Penerapan azas akuntabilitas di atas sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Agama.

Prinsip selalu berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan menjadi indikator penting akuntabilitas kinerja. Sebagaimana dimaklumi, akuntabilitas telah menjadi isu sentral dalam mewujudkan *good governance* saat ini. Sebagai konsekuensi logisnya, setiap agenda pemerintahan baik menyangkut program dan anggaran, kebijakan, strategi pengembangan kelembagaan, SDM, sarana prasarana, dan sebagainya harus sesuai dengan ketentuan. *Good governance* yang menjunjung tinggi prinsip efisiensi, transparansi, dan efektifitas merupakan parameter dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah, terutama dalam menjalankan program dan anggaran. Kinerja aparatur pemerintah yang semula berpegang pada prinsip *responsibility* (tanggung jawab) dan *obligation* (kewajiban), kini harus mengacu pada kriteria *accountability*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjadi tonggak perubahan manajemen SDM Aparatur. Undang-undang tersebut telah membentuk sebuah mekanisme ideal untuk menciptakan organisasi pemerintah yang profesional. Kata kunci dari keseluruhan fungsi dan manajemen SDM Aparatur pasca diberlakukannya UU ASN adalah "kinerja". Manajemen ASN dibangun dalam kerangka dan atas dasar manajemen kinerja. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang sehat dan obyektif, yang di sisi lain terkandung kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan berbagai kompetensi. Program-program pengembangan kapasitas ASN berbasis kompetensi sangat dibutuhkan untuk membangun kesiapan pegawai menyambut kondisi "*right man on the right place*".

SDM sebagai Aparatur Sipil Negara menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan berperan sebagai agen perubahan (*agent of change*) itu sendiri. Keterlibatan langsung dalam melaksanakan perubahan, mulai dari

merencanakan sampai mengimplementasikannya. Agen perubahan ini terdiri dari pimpinan organisasi dan pegawai yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tuntutan peran agen perubahan. Peran yang penting dari agen perubahan adalah sebagai *role model* yaitu individu yang bisa dijadikan contoh dalam prestasi kerjanya, pola pikirnya (*mind-set*) dan budaya kerjanya (*culture-set*). Pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai salah satu program pengembangan kapasitas harus difokuskan pada peningkatan ketiga kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosio kultural.

Tingginya harapan terhadap SDM Aparatur yang kompeten dan mampu mengimbangi perkembangan jaman, maka program-program pengembangan berbasis kompetensi menjadi penting diwujudkan. Pengembangan kapasitas yang menjadi hak ASN sebagaimana Pasal 70 UU ASN dilakukan salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat). Setiap diklat yang dirancang untuk pengembangan aparatur harus berorientasi kepada pencapaian kinerja yang memiliki tujuan jelas (*clear objective*) berkaitan dengan kinerja yang hendak dicapai. Selain itu juga memperhatikan sistem kualitas diklat (*education and training quality system*) yang mencakup *inputs, procedures, processes, and standard*.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Instansi kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan LKj Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Kementerian Agama yaitu KMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020 – 2024, dan KMA Nomor 94 Tahun

2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

B. Dasar Hukum

Ketentuan hukum peraturan perundang-undangan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama.
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor .09/M.PAN/05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20/M.PAN/11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan IKU.
11. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. KMA Nomor 18 Tahun 2020 tentang Renstra Kemenag 2020 – 2024.
13. KMA Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI (PMA Nomor 19 Tahun 2019 pasal 3), dengan lokasi yang sangat strategis karena berdekatan dengan perkantoran pemerintahan provinsi dan instansi vertikal lainnya, yakni berada di Jl. Seikh Nawawi Albantani no 1 Blok Instansi Vertikal KP3B Provinsi Banten .

2. Tugas Pokok

Tugas pokok pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan dalam PMA Nomor 19 tahun 2019 yaitu melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dalam pembangunan bidang agama pada wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan, serta menjalankan tugas berdasarkan PMA No. 19 tahun 2019. Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam PMA Nomor 19 tahun 2019, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;

- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan.
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kementerian Agama telah merumuskan landasan sebagai penunjang pelaksanaan visi dan misi dengan jargon Lima Nilai Budaya Kerja, tentunya hal tersebut akan menjadi tolak ukur system pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Lima Nilai Budaya Kerja di atas merupakan cerminan dan cara pandang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan di masa mendatang dan menuju kondisi yang diinginkan. Visi dan Misi Kementerian Agama mengandung arti sebagai regulator dibidang keagamaan diharapkan mampu menjadi institusi yang mengedepankan Lima Nilai Budaya Kerja, yakni: **1) Integritas, 2) Profesional, 3) Inovasi, 4) Tanggung Jawab, dan 5) Keteladanan**, yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional diharapkan mampu membawa lembaga sebagai motivator dan inspirator keagamaan yang tangguh, santun, berbudi luhur, taat dan disiplin, serta berdaya saing global.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah menyusun landasan ideal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a. Peningkatkan Pembinaan dan Pelayanan Bimas Islam, Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pemberdayaan Masjid dan Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.
- b. Peningkatkan Pelayanan dan Pengelolaan Administrasi dan Informasi.

- c. Peningkatkan Pembinaan Kerukunan Antar Umat Beragama.
- d. Peningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengelolaan potensi ekonomi agama.
- e. Peningkatkan Pengkoordinasian Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Program.
- f. Peningkatkan Koordinasi dengan Pemerintahan Daerah dan Instansi terkait serta Lembaga Masyarakat.

Di samping tugas pokok diatas Kementerian Agama mempunyai beberapa entri poin program kerja yang menjadi jabaran dari jargon dan atau istilah-istilah dalam pelaksanaan kegiatan di atas untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan target utama "**bersih melayani**".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menyelenggarakan fungsinya:

- a. Perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat;
- b. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji, dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat, pemberdayaan masjid dan urusan agama Islam, pendidikan agama, dan bimbingan masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah;
- d. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan Raudatul Athfal, Madrasah, Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Pondok Pesantren;
- e. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- f. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- g. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;

- h. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

D. Aspek Strategis

Berbagai kesulitan maupun kemajuan telah dialami oleh masyarakat Banten sampai menghasilkan pembangunan bidang agama sebagaimana telah dinikmati oleh masyarakat daerah secara keseluruhan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang dialami, sehingga belum semua program dan kegiatan pembangunan agama dapat diwujudkan. Karena itu, kelanjutan proses pembangunan bidang agama ke depan, merupakan upaya yang sangat penting dalam mendorong proses pembangunan bidang agama yang berkelanjutan.

Dalam rangka memberikan arah yang jelas tentang pembangunan bidang agama di Banten, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2020-2024, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menyusun Rencana Strategik (Renstra) Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten Nomor: 33 Tahun 2020, tanggal 28 Agustus 2020. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten 2020-2024 ini, sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan bidang agama di Banten, bertujuan untuk memberikan arah dan pentahapan pembangunan bidang agama untuk periode 5 tahun.

Diharapkan seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bidang agama, akan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu sama lainnya di dalam mendorong proses pembangunan bidang agama di Banten secara keseluruhan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk megembangkan kompetensinya baik melalui pembinaan intern, orientasi, workshop, maupun ditugaskan khusus untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan penataran. Menyikapi hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang mempunyai tugas melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi Menteri Agama berkewajiban untuk membangun dan mengembangkan potensi masing-masing pegawai. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang diharapkan tercapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, bahwa arah kebijakan dalam pengembangan aparatur negara tidak hanya diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas intelektual saja, namun juga peningkatan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini berimplikasi terhadap lembaga struktural kebawahnya yaitu adanya kewajiban untuk turut serta membangun karakter (*character building*) aparatur Kementerian Agama yang jumlahnya 8 (delapan) Kantor Kementerian Agama Kab./Kota dan lebih dari 8 ribu orang Pegawai yang ada juga harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembinaan dan pengembangan manajemen PNS yang terarah, integral dan transparan. Sehingga pada akhir 2019 seluruh Kantor Kementerian Agama Kab./Kota wajib sudah menjalankan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan hal ini sudah terealisasi guna mempercepat dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai komponen dalam birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentu berkewajiban untuk mendukung agenda pembangunan daerah secara lintas sektoral sesuai tanggung jawabnya, yaitu membangun peradaban dan kepribadian masyarakat yang madani di Wilayah Provinsi Banten.

F. Permasalahan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten

- Adanya struktur organisasi yang secara implisit tumpang tindih dengan kebijakan baru pemerintah yakni adanya BPJPH, BWI dan BAZNAS, sehingga fungsi dari Seksi Produk Halal, Seksi Pemberdayaan Zakat dan Seksi Pemberdayaan Wakaf tidak leluasa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk terjun langsung ke masyarakat apalagi kurang mendapat dukungan penuh dari segi anggaran;
- Masih belum meratanya intelektualitas dan kemampuan administratif dari pegawai di masing-masing bidang, sub bagian, dan Kantor Kementerian Agama Kab./Kota;
- Minimnya Anggaran Pembinaan, sehingga belum tercapainya program pembinaan pegawai sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsi;
- Belum meratanya tenaga Penyuluh Agama Fungsional di masing-masing Kab./Kota, sehingga pembinaan umat masih dibantu oleh masyarakat da'i dan tenaga Penyuluh Agama Honorer.
- Belum secara spesifiknya dan rincinya anggaran di RKAK/L dan atau DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam mendukung implementasi kegiatan Rencana Strategis dan Sasaran Strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama seperti berikut:
 - Pada sasaran strategis "Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama" dengan IKU Menteri Agama "Indeks Keshalihan Sosial" dan IKU Kanwil Kemenag Prov. Banten "Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah dan Jumlah Rumah Ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan" yang termuat dalam Renstra Kanwil Kemenag Prov. Banten tidak didukung oleh anggaran yang memadai dalam RKAK/L atau DIPA secara spesifik;
 - Rincian anggaran yang lebih spesifik dalam rangka peningkatan APM/APK serta peningkatan Nilai Rerata UN dan indeks integritas siswa dan atau santri tidak termuat secara jelas dalam RKAK/L dan atau DIPA Kanwil Kemenag Prov. Banten Tahun Anggaran 2020.

G. Struktur Organisasi

Kantor Wilayah Kementerian Agama saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 198 orang dengan struktur yang ada didukung dengan 1 Bagian Tata Usaha, 5 bidang, 4 pembimas, 5 sub bagian dan 25 seksi yaitu :

1. Bidang Urais dan Binsyar (Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah), terdiri dari 5 seksi, yaitu :
 - a. Seksi Kepenghuluan
 - b. Seksi Kemasjidan
 - c. Seksi Pemberdayaan KUA
 - d. Seksi Produk halal
 - e. Pembinaan Syari'ah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam
2. Bidang PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah), terdiri dari 5 seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji
 - b. Seksi Pembinaan Haji dan Umrah
 - c. Seksi Akomodasi, Transportasi, dan Perlengkapan Haji
 - d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
 - e. Seksi Sistem Informasi Haji
3. Bidang Penmad (Pendidikan Madrasah)
 - a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana
 - d. Seksi Kesiswaan
 - e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah
4. Bidang Pakis (Pendidikan Agama & Keagamaan Islam), terdiri dari 5 seksi, yaitu
 - a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
 - b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah
 - c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Al-Quran
 - d. Seksi Pondok Pesantren
 - e. Seksi Sistem Informasi Madrasah Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

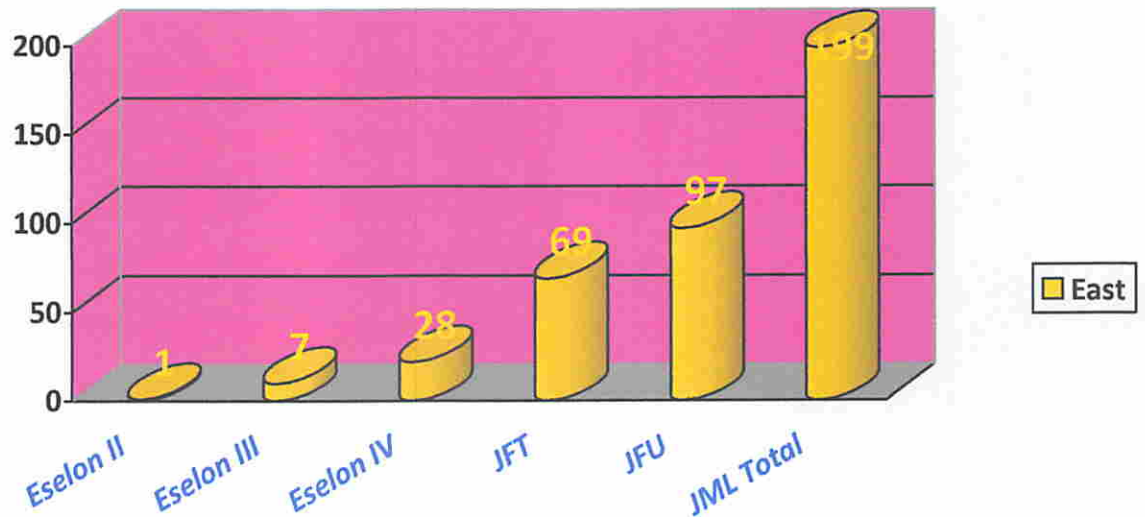
5. Bidang Penais Zawa (Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf), terdiri dari 5 seksi, yaitu
 - a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
 - b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam
 - c. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits
 - d. Seksi Pemberdayaan Zakat
 - e. Seksi Pemberdayaan Wakaf
6. Bagian Tata Usaha, terdiri dari 5 sub bagian, yaitu
 - a. Subbag Perencanaan data dan Informasi
 - b. Subbag Kepegawaian dan Hukum
 - c. Subbag dan Keuangan dan BMN
 - d. Subbag Umum Hubungan Masyarakat
 - e. Subbag Ortala dan Kerukunan Umat Beragama
7. Pembimas, terdiri dari 4 pembimas, yaitu:
 - a. Pembimas Kristen
 - b. Pembimas Katholik
 - c. Pembimas Hindu
 - d. Pembimas Budha

H. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten secara internal keseluruhan berjumlah 199 orang, dengan komposisi sebagai berikut:

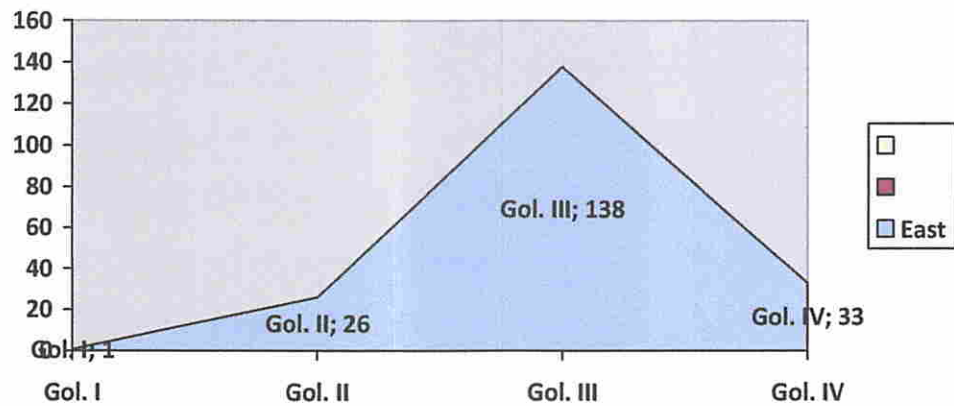
1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1) Pejabat Eselon II | : 1 Orang |
| 2) Pejabat Eselon III | : 10 Orang |
| 3) Pejabat Eselon IV.a | : 22 Orang |
| 4) Jabatan Fungsional Tertentu | : 97 Orang |
| 5) Jabatan Pelaksana | : 69 Orang |



2. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1) Golongan I | : 1 Orang |
| 2) Golongan II | : 26 Orang |
| 3) Golongan III | : 138 Orang |
| 4) Golongan IV | : 33 Orang |



Selain Sumber Daya Manusia Kantor Wilayah Kementerian Agama juga di dukung dengan Sarana dan Prasarana, antara lain:

1. Gedung Perkantoran beserta Sarana Kerja;
2. Ruang Rapat Khusus;
3. Ruangan Khusus SSKOHAT;
4. Ruangan Perpustakaan;
5. Laboratorium Kerukunan;
6. Aula Ruang Pertemuan;
7. Lapangan Olah Raga;
8. Lapangan Parkir;
9. Masjid;
10. Kantin dan Koperasi
11. Perpustakaan;
12. Pos Satpam
13. MCK.

I. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 berpedoman pada PERMENPAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan taacara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan
 - 4. Sasaran
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
 - 1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan
 - 2. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan target jangka menengah.
4. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencana Kinerja Strategis dan RKT Tahun 2020

Program Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten 2020-2024 diarahkan kepada 5 (lima) hal pokok, yaitu: 1) Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan sosial; 2) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 3) Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 4) Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas; 5) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024 yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Stratejik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Serta Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam BAB ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai Tahun 2020 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2020.

Rencana Strategik dan Rencana Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dapat kita lihat pada Renstra Tahun 2020 s/d 2024 dan RKT 2020, sebagai berikut:

1. Rencana Stratejik

Rencana Strategik adalah suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun yang disusun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik Kanwil Kementerian Agama Prov. Banten yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi (Kebijakan Dan Program) sebagai berikut ;

Strategi untuk merealisasikan Lima Tujuan Renstra 2020-2024 tersebut dituangkan dalam 9 Program Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam :

1. Program Dukungan Manajemen, Pelaksanaan Tugas Tekhnis lainnya
2. Program Kerukunan Umat Beragama;
3. Program Bimbingan Masyarakat Islam
4. Program Pendidikan Islam
5. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
7. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
8. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
9. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

2. Visi

Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam 5 tahun rencana strategis 2020-2024. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Kementerian agama.

Di samping itu, visi juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai dalam pembangunan bidang agama di Banten.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2005 Pasal 63, Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang keagamaan.

Tugas pokok Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 19 Tahun 2019, BAB I Bagian Pertama Pasal [4], adalah : melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Banten berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Peraturan Perundang Perundangan.

Mempertimbangkan berbagai capaian program pada periode pembangunan 2020-2024 serta berbagai perubahan situasi dan jajaran strategis, visi yang hendak diwujudkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten 2020-2024 adalah:

“Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

3. Misi

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, untuk dapat mewujudkan visi sebagaimana dijelaskan terdahulu, maka misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesalehan umat beragama;
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- 4) Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu;
- 5) Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan;
- 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Tujuan

Kementerian Agama merupakan kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara lebih khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi), dan pendidikan keagamaan.

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang Agama yang hendak dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten adalah " terwujudnya masyarakat Banten yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)".

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Agama, Kementerian Agama menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi yang diembannya.

Tujuan pembangunan bidang agama (TA) untuk periode 2020-2024 adalah:

- TA.1 Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- TA.2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

TA.3. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

TA.4. Peningkatan budaya birokrasi kepekerjaan yang bersih, melayani dan responsi.

Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan (TP) adalah:

TP.1. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;

5. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuh bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, maka telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan.

Sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten merupakan bagian yang takterpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi.

Dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada, dan sinergi dengan visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2020-2024 yaitu sebanyak 11 dari 13 sasaran strategis Kementerian Agama RI, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.
5. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat;

6. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran;
7. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan;
8. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah;
9. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan;
10. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa;
11. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Sesuai tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Provinsi Banten memiliki dua bidang sasaran, yakni sasaran terkait bidang agama dan sasaran terkait bidang pendidikan.

Sasaran strategis Kementerian Agama terkait bidang agama adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis (SS.1) adalah Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks kesalehan umat beragama yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Menteri Agama RI dan di jabarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan Sasaran Kegiatannya Meningkatnya kualitas penyuluhan, dengan cara pengukuran indikatornya melalui Survey diukur dengan 4 variabel indikator yang mencakup komponen sebagai berikut:
 - a) Intensitas Ritual;
 - b) Kepedulian sosial,
 - c) Relasi antar manusia, dan
 - d) Etika dan budi pekerti;
- 2) Sasaran Strategis (SS.2) adalah Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yang merupakan Indikator Kinerja Utama Menteri Agama RI dan di jabarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan cara pengukuran indikatornya melalui Survey

diukur dengan indikator tersebut dapat diukur dengan 3 variabel indikator yang mencakup komponen sebagai berikut:

- a) Toleransi;
 - b) Kesetaraan; dan
 - c) Kerjasama.
- 3) Sasaran Strategis (SS.3) Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama, indikator tersebut dapat diukur dengan beberapa variabel indikator sebagai berikut:
- a) Akomodatif terhadap budaya;
 - b) Penurunan konflik ;
- 4) Sasaran Strategis (SS.4) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
- a) Indeks kepuasan KUA;
 - b) Tingkat kepuasan produk halal;
 - c) Indeks kepuasan ibadah haji.

indikator tersebut dapat diukur dengan survey yaitu beberapa variabel indikator sebagai berikut:

- a) Indeks kepuasan KUA;
 - ▶ Alat ukur sesuai Permenpan RB nomor 14 tahun 2017.
- b) Tingkat kepuasan produk halal;
 - ▶ Registrasi,
 - ▶ Sertifikasi
- c) Indeks kepuasan ibadah haji;
 - ▶ Pendaftaran,
 - ▶ Bimbingan manasik haji,
 - ▶ Pemberangkatan,
 - ▶ Prosesi ibadah haji,
 - ▶ Pemulangan.

5) Sasaran Strategis (SS.5) Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama adalah sebagai berikut: Persentase dana social keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan, indikator tersebut dapat diukur dengan :

► jumlah dana social keagamaan (zakat/sbaga keagamaan kriste/katolik/dana daa/daa paraita/daa kebaika) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan;

Adapun variable indikatornya:

Jumlah dana social keagamaan (zakat/sbaga keagamaan kriste/katolik/dana daa/daa paraita/daa kebaika) yang mendukung layanan pendidikan dan keagamaan;

6) Sasaran Strategis (SS.6) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran, yang dijabarkan dengan indikator kinerja sasaran:

1. Persentase siswa diatas batas kompetensi minimal dalam test asesmen kompetensi :

- a) Literasi
- b) Numerasi

2. Persentase siswa diatas batas kompetensi minimal dalam test Programme for International Student Assesment (PISA):

- a) Membaca
- b) Matematika
- c) Saint.

7) Sasaran Strategis (SS.7) Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, yang dijabarkan dengan indikator kinerja sasaran:

a) Meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman seminari/nava dhammasekha:

b) Meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;

- c) Meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
- d) Meningkatnya APK MA/Ulya/SMPTK/SMAK/Utama Widya Pasraman;
- e) Meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman;
- f) Meningkatnya APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman
- g) Meningkatnya APK PTK/MA/ Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman.

Adapun Variabel Indikator sasaran Kinerja nya sebagai berikut:

- a) Meningkatnya APK RA/Pratama Widya Pasraman/Taman seminari/nava dhammasekha:
 - 1) Jumlah Siswa RA/Pratama Widya Pasraman;
 - Yang berusia2) Jumlah penduduk usia 4 s.d 6.
- b) Meningkatnya APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah Siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman,
 - 2) Jumlah penduduk usia 7 s.d 12.
- c) Meningkatnya APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah Siswa MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman;
 - 2) Jumlah penduduk usia 13 s.d 15
- d) Meningkatnya APK MA/Ulya/SMPTK/SMAK/Utama Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah Siswa MA/Ulya/SMPTK/SMAK/Utama Widya Pasraman.
 - 2) Jumlah penduduk 16 s.d 18.
- e) Meningkatnya APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah Siswa MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang berusia 7 s.d 12 tahun.

- 2) Jumlah penduduk yang berusia 7 s.d 12 tahun.
- f) Meningkatnya APM MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah Siswa MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang berusia 13 s.d 15 tahun
 - 2) Jumlah penduduk yang berusia 13 s.d 15 tahun
- g) Meningkatnya APK MA/ Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman:
 - 1) Jumlah siswa MA/ Ulya/SMTK/SMAK/Utama Widya Pasraman ang berusia 16 s.d 18 tahun.
 - 2) Jumlah penduduk yang berusia 16 s.d 18 tahun.
- 8) Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik yang dijabarkan dengan indicator kinerja sasaran Rasio guru terhadap siswa yang memenuhi SNP.

Adapun Variabel Indikator sasaran Kinerja nya sebagai berikut:

- 1) Jumlah guru yang memenuhi SNP;
- 2) Jumlah siswa.
- 9) Meningkatnya kualitas penjamin mutu pendidikan, yang dijabarkan dengan indicator kinerja sasaran :
 - a) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi B.
 - b) Persentase MTs/Wustha/SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang terakreditasi B.
 - c) Persentase MA/Ulya/SMAK/Utama Widya Pasraman yang terakreditasi B.

Adapun Variabel Indikator sasaran Kinerja nya sebagai berikut:

- a) Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi B.
 - 1) Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang terakreditasi B.
 - 2) Jumlah MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman.

- 2) Penataan Peraturan Perundang-undangan/deregulasi kebijakan.
- 3) Penataan Organisasi/Kelembagaan.
- 4) Penataan Tata laksana.
- 5) Sistem Manajemen SDM
- 6) Penguatan Akuntabilitas.
- 7) Pengawasan.
- 8) Pelayanan publik

B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja tidak terlepas dari arah kebijakan-kebijakan Pembangunan Bidang Agama dan sebagai bahan pedoman kerja pada tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provisini Banten telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk masa kerja tahun anggaran 2020, yang menjadi acuan dalam melaksanakan kerja dan penetapan RKT adalah dengan dasar penetapan RKAKL yang telah mengalami revisi final. RKT dimaksud adalah merupakan turunan pedoman pelaksanaan kerja dan Pembangunan Bidang Agama dari Menteri Agama RI yang di implementasikan di masing-masing wilayah dalam hal ini Wilayah Provisini Banten menetapkan 9 Program Kerja dengan kegiatan prioritasnya sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama dan Program Kerukunan Umat Beragama.

Tujuan utama program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan serta pemberian dukungan manajemen kepada semua unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten mulai dari satker tingkat bawah sampai atas. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai oleh program ini adalah

meningkatnya kualitas penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan sasaran (*outcome*) meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama, yang ditandai dengan:

- a. Meningkatnya kualitas dan layanan administrasi Keuangan dan BMN;
- b. Meningkatnya kualitas administrasi dan layanan Perencanaan;
- c. Meningkatnya kualitas administrasi Administrasi umum dan layanan sarana prasarana internal;

2. Program Kerukunan Umat Beragama;

Penyelenggaraan program ini terkait erat dengan kebijakan memperkuat kerukunan hidup umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Program Kerukunan Umat Beragama juga berperan dalam realisasi kebijakan Kementerian Agama dalam hal peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, peningkatan pelayanan agama, penguatan pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.

Program Peningkatan Kerukunan Ummat Beragama dengan sasaran (*outcome*): meningkatnya kerukunan hidup ummat beragama, yang ditandai dengan nilai indeks kerukunan ummat beragama dengan nilai baik pada tahun 2020.

Untuk mencapai *outcome* tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

- a. Meningkatnya kualitas layanan umat khonghucu;

- ▶ Tunjangan penyuluh honorer
- b. Meningkatnya kualitas Kerukunan Hidup umat Beragama;
 - ▶ Pengembangan kerukunan hidup beragama
 - ▶ Meningkatnya Kualitas Mutu Layanan Operasional Sekber FKUB Provinsi;
 - ▶ Desa sadar kerukunan
- c. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pendidikan keagamaan Khonghucu;
 - ▶ Insentif guru agama khonghucu.

3. Program Bimbingan Masyarakat islam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama Islam dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Tujuan utama program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan bimbingan masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia, manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan. Hasil (outcome) yang hendak dicapai dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. antara lain:

- a. Meningkatnya Pengelolaan KUA dan Keluarga Sakinah yang terbina;
 - ▶ Penghulu yang terbina
 - ▶ KUA yang memenuhi standar pelayanan minimal
 - ▶ Kelarga sakinah yang terbina
 - ▶ Pembangunan Balai Nikah
 - ▶ Bimbingan perkawinan pra nikah
 - ▶ Rehabilitasi KUA
 - ▶ Sarana dan prasarana KUA

- b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan pembinaan Pemberdayaan zakat dan wakaf;
 - ▶ Lembaga yang mendapatkan pembinaan manajemen ekonomi umat
 - ▶ Literasi Perekonomian dan Keuangan syariah
 - ▶ Pengembangan kemitraan ekonomi umat
 - ▶ Lembaga zakat yang terakreditasi
 - ▶ Pengamanan asset wakaf
- c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan agama Islam;
 - ▶ Penyuluh agama islam yang berkualitas
 - ▶ Musbaqoh Al-qur'an dan Al Hadits
 - ▶ Dawah dan Hari Besar Islam
 - ▶ Ormas dan Lembaga Keagamaan
 - ▶ Layanan syariah
 - ▶ Pengelolaan Hisab Rukyat
 - ▶ Pembinaan paham keagamaan
 - ▶ Direktori pustaka islam
 - ▶ Layanan dukungan manajemen eselon 1
 - ▶ Layanan sarana dan prasarana internal
 - ▶ Layanan perkantoran.

4. Program Pendidikan Islam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Madrasah, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam.

Program Pendidikan Islam, dengan sasaran (outcome) yang meliputi:

- a. Meningkatnya mutu dan relevansi Pendidikan agama islam;
 - ▶ Dokumen standar Nasional Pendidikan agama islam.

- ▶ Guru PAI yang meningkat kompetensinya.
- b. Meningkatnya akses mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - ▶ Dokumen standar nasional
 - ▶ Guru/ustad Pendidikan Keagamaan Islam penerima tunjangan insentif.
 - ▶ Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Quran, Pendidikan Pesantren penerima Bantuan Operasional Pendidikan.
 - ▶ Santri Pendidikan Diniyah formal/muadalah/PPS Tk Ula penerima bantuan PIP.
 - ▶ Santri Pendidikan Diniyah formal/muadalah/PPS Tk Wustha penerima bantuan PIP.
 - ▶ Santri Pendidikan Diniyah formal/muadalah/PPS Tk Ulya penerima bantuan PIP.
- c. Peningkatan akses mutu dan relevansi Madrasah;
 - ▶ Madrasah dan RA yang terakreditasi.
 - ▶ Dokumen standar pendidikan
 - ▶ Siswa MTs penerima BOS
 - ▶ Siswa MA penerima BOS
 - ▶ BOP RA
 - ▶ Layanan dukungan manajemen satker
- d. Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan madrasah;
 - ▶ Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang dinilai kinerjanya.
 - ▶ Guru madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)
 - ▶ Guru non PNS penerima tunjangan khusus
 - ▶ Layanan dukungan Manajemen eselon 1
 - ▶ Layanan perkantoran.

5. Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang ditandai dengan tingkat kepuasan jamaah, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jamaah, sistem informasi yang memadai, serta tata kelola yang baik dan bersih. Adapun hasil jangka menengah yang hendak dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pembinaan, pelayanan dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah dengan sasaran (outcome) terwujudnya penyelenggaraan haji dan umrah yang aman, tertib dan lancar. Untuk mencapai outcome tersebut dilaksanakan sejumlah kegiatan:

- a. Pelayanan haji dalam negeri;
 - ▶ Pelayanan dokumen dan perlengkapan jamaah haji.
 - ▶ Petugas haji yang professional
 - ▶ Bimbingan Jemaah Haji
- b. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya;
 - ▶ Layanan dukungan manajemen eselon 1
 - ▶ Layanan sarana dan prasarana internal
 - ▶ Layanan perkantoran

6. Program Bimbingan Masyarakat Katolik;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama Katolik dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah terwujudnya masyarakat Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berbhinneka Tunggal Ika.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah :

- a. Pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Agama Katolik;
 - ▶ Guru non PNS penerima insentif.
 - ▶ Guru Non PNS penerima Tunjangan Profesi
 - ▶ Guru Pendidikan agama katolik yang meningkat kompetensinya
 - ▶ KKG/MGMP Katolik yang menerima bantuan.
- b. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik;
 - ▶ Penyuluh agama katolik non PNS penerima tunjangan.
 - ▶ Dialog kerukunan intern umat beragama Katolik
 - ▶ Lembaga keagamaan katolik yang difasilitasi
 - ▶ Pemberdayaan kelompok kategori Katolik
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya:
 - ▶ Layanan perkantoran
- d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan Bimas katolik.
 - ▶ Layanan perkantoran.

7. Program Bimbingan Masyarakat Kristen

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama Kristen dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah :

- a. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen yang didukung dengan sasaran kegiatan agar capaian outcome dapat sesuai dengan yang diharapkan, antara lain;
 - ▶ Program Indonesia Pintar SMTK/SMAK ;
 - ▶ Program Indonesia Pintar SDTK;
 - ▶ BOS siswa SMTK
 - ▶ BOS siswa SMPTK
 - ▶ BOS siswa SDTK
 - ▶ Guru non PNS penerima profesi
 - ▶ Guru non PNS penerima Insentif
 - ▶ Guru yang memperoleh peningkatan kompetensi dan pembinaan
 - b. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama Kristen;
 - ▶ Rumah ibadah agama Kristen yang bersih dan sehat
 - ▶ Dialog kerukunan intern umat Kristen
 - ▶ Penyuluh agama Kristen non PNS penerima tunjangan
 - ▶ Pembinaan penyuluh agama Kristen
 - c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - ▶ Layanan dukungan manajemen eselon I
 - ▶ Layanan perkantoran
 - d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas Kristen
 - ▶ Layanan perkantoran.
8. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
- Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama Hindu dalam melaksanakan

ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah: terwujudnya peningkatan signifikan kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas, kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik pendidikan Agama Hindu. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah :

- a. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu yang didukung dengan sasaran kegiatan agar capaian outcome dapat sesuai dengan yang diharapkan, antara lain;
 - ▶ Guru PA hindu non PNS penerima tunjangan profesi
 - ▶ Peningkatan kompetensi guru
 - ▶ Penjaminan mutu sekolah minggu/pasraman
- b. Pengelolaan dan pembinaan urusan agama hindu
 - ▶ Peningkatan kompetensi penyuluh.
 - ▶ Tenaga penyuluh non PNS
 - ▶ Penyediaan rumah ibadah yang sehat dan bersih
 - ▶ Bantuan operasional lembaga agama dan keagamaan.
 - ▶ Bimbingan keluarga sukinah
- c. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - ▶ Layanan perkantoran
- d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan
 - ▶ Layanan dukungan manajemen eselon I
 - ▶ Layanan sarana dan prasarana internal
 - ▶ Layanan perkantoran

9. Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama Buddha dalam melaksanakan ajaran agama, mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

Hasil yang hendak dicapai program ini dalam jangka menengah adalah meningkatnya kualitas bimbingan, pelayanan, pemberdayaan, pengembangan potensi umat, dan pengembangan pendidikan Agama dan pendidikan keagamaan Buddha Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan program tersebut adalah :

- a. Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha yang didukung dengan sasaran kegiatan agar capaian outcome dapat sesuai dengan yang diharapkan, antara lain;
 - ▶ Umat Buddha agama yang terbina
 - ▶ Penyuluh agama Buddha non PNS agama mendapatkan tunjangan
 - ▶ Bantuan lembaga agama dan keagamaan Buddha
 - ▶ Dialog kerukunan intern umat Buddha
- b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - ▶ Laanan perkantoran
- c. Pengelolaan dan pembinaan pendidikan agama Buddha:
 - ▶ Tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya.
 - ▶ Peserta didik yang mendapatkan pembinaan karakter
 - ▶ Tenaga pendidik dan kependidikan agama dan keagamaan Buddha yang mendapatkan insentif.

- ▶ Guru agama non PNS yang menerima tunjangan profesi.
 - ▶ Lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan rehab/renov/pembangunan
 - ▶ Lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan sarana dan prasarana.
 - ▶ Lembaga pendidikan keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan operasional
 - ▶ Bantuan subsidi upah bagi pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Penyelenggaraan administrasi perkantoran pendidikan bimas Buddha;
- ▶ Layanan sarana dan prasarana internal.
 - ▶ Layanan perkantoran.

C. Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan dalam hal ini anatar Kakanwil dan Kabag, Para Kabid dan Para Pembimas untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Satker masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat di dalam penetapan kinerja di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Banten meliputi Unit eselon II dan III sebagai panduan/program kerja dan dipertanggungjawabkan kepada pimpinan satker dalam menjalankan program kinerja yang akan di laksanakan melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya demi merealisasikan target yang sudah di tetapkan. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan Kinerja disepakati bersama antara pengemban tugas dengan atasannya

(Performance Agreement) juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai, Penetapan Kinerja yang dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (performance accountability report).

Tabel 1
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Sekretariat dan KUB

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA		
		Anggaran Rp.	JML	@ %
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	MENINGKATKANNYA KUALITAS TATA KELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA	10.910.519.000		100
1.1 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN				
	Meningkatnya Layanan perkatoran	6.192.074.000	1	Layanan 100
1.2 Pembinaan Administrasi Perencanaan				
	Meningkatnya Layanan Administrasi Perencanaan	150.000.000	1	Layanan 100
1.3 Pembinaan Administrasi Umum		4.568.445.000		
	A.Meningkatnya Layanan sarana dan prasarana	50.000.000	1	Layanan 100
	B.Meningkatnya Layanan Perkatoran	4.518.445.000	1	Layanan 100
2. PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		447.049.000		
2.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Umat Khonghucu		300.000.000		
	Penyuluh honorer	300.000.000	25	Org 100
2.2 Meningkatkan Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama		102.049.000		

	A. Meningkatnya Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	20.000.000	2	Layanan	100
	B. Meningkatnya Kualitas Mutu Layanan Operasional Sekber FKUB Provinsi	50.000.000	1	Lok	100
	C. Meningkatnya Kualitas Mutu Layanan Desa Sadar Kerukunan	30.000.000	1	Lok	100
	D. Meningkatnya Kualitas Mutu Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.049.000	1	Thn	100
2.3. Meningkatnya Pembinaan Pembinaan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu		45.000.000			
	. Meningkatnya guru agama khonghucu penerima insentif	45.000.000	15	Org	100

Tabel 2
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Bimas Islam

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN SATRATEGIS/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
III. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	MENINGKATNYA KUALITAS BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM/PELAYANAN KEAGAMAAN DAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA	8.538.241.000			
3.1 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah		1.890.100.000			
	A. Meningkatnya Kualitas Penghulu yang terbina	145.000.000	1	Org	100
	B. Meningkatnya Kualitas Mutu dan Layanan KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	293.100.000	4	lok	100
	C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sakinah yang Terbina	82.500.000	1	Pasangan	100

	D. Meningkatkan Layanan Pembagunan gedung Balai Nikah	48.000.000	1	Lok	100
	E. Meningkatkan Layanan Bimbingan perkawinan pra Nikah	170.000.000	2	Org	100
	F.Rehabilitasi KUA	750.000.000	5	Lok	100
	G.Sarana dan Prasarana KUA	300.000.000	25	Lok	100
3.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	235.496.000			
	A. Meningkatkan Kualitas lembaga agama yang mendapatkan pembinaan Manajemen ekonomi umat	56.000.000	1	lbg	100
	B. Literasi Perekonomian dan keuangan syariah	5.472.000	1	org	100
	C. Pengembangan kemitraan ekonomi umat	85.000.000	1	lok	100
	D. Meningkatkan Kualitas Lembaga Zakat yang terakreditasi	8.000.000	8	lbg	100
	E. Meningkatkan kualitas pengamanan asset wakaf	40.000.000	1	lok	100
	F.Legalitas taah wakaf	41.024.000	35	Lok	100
3.3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	919.100.000			
	A. Meningkatkan Kualitas Penyuluh Agama Islam yang berkualitas	105.100.000	47	org	100
	B. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Prestasi MTQ/STQ dan Al-Hadis	85.000.000	2	Keg	100
	C. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Dakwah dan Haribesar Islam	10.000.000	1	Keg	100
	D. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Ormas dan Lembaga Keagamaan	719.000.000	14	lbg	100
3.4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	219.000.000			

	A. Meningkatkan kualitas mutu dan Layanan Syaria'h	9.000.000	1	Keg	100
	B. Meningkatkan Kualitas Layanan Hisab dan Rukyat	160.000.000	1	Keg	100
	C. Pembinaan Paham keagamaan	10.000.000	1	Keg	100
	D. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Direktori Pustaka Islam	40.000.000	1	unit	100
3.5 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Birnas Islam		5.274.545.000			
	Tertaksananya Dukungan Manajemen eselon 1	250.000.000	1	Keg	100
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000	1	Layanan	100
	Layanan Perkantoran	4.974.545.000	1	Layanan	100

Tabel 3
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Pendidikan Islam

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
IV. PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM/MENINGKATNYA AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	116.560.802.000			
4.1 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		151.000.000			
	A. Meningkatkan Mutu dan Layanan Dokumen Standar Nasional	73.000.000	1	Keg	100

Pendidikan Agama Islam					
B. Meningkatkan Mutu dan Layanan Guru PAI yang meningkatkan kompetensinya	78.000.000	80	org	100	
4.2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam	13.428.000.000				
A. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam	75.000.000	1	Keg	100	
B. Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Insentif	1.032.000.000	224	org	100	
C. Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	464.000.000	80	lbg	100	
D. Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PPP	1.444.500.000	3.210	org	100	
E. Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PPP	9.202.500.000	12.270	org	100	
F. Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PPP	1.210.000.000	1.210	org	100	
4.3 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah	95.669.600.000				
A. Madrasah dan RA yang Terakreditasi	10.000.000	15	lbg	100	
B. Dokumen Standar Nasional Pendidikan	173.570.000	1	lbg	100	
C. Siswa MTs penerima BOS	600.000	2.342	Keg	100	
D. Siswa MA penerima BOS	72.087.000.000	52.515	org	100	
E. BOP RA	23.346.000.000	58.365	Org	100	
F. Layanan Dukungan Manajemen Satker	52.430.000	1	Lay	100	

4.4 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		816.036.000				
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dimilai Kinerjanya	30.000.000	10	org	100	
	Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	78.906.000	1	Keg	100	
	Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	707.130.000	97	Keg	100	
4.5 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		6.496.166.000				
	A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	509.995.000	1	lay	100	
	B. Layanan Perkantoran	5.986.171.000	2	Keg	100	

Tabel 4
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Penyelenggaraan Haji dan Umrah

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN HAJI DAN UMRAH	7.869.687.000			
5.1 Pelayanan Haji Dalam Negeri		185.982.000			
	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	185.982.000	9.745	org	100
5.2 Pembinaan Haji		2.637.298.000			

	A. Meningkatkan Mutu dan Layanan Petugas Haji yang Profesional	29.660.000	60	org	100
	B. Meningkatkan Mutu dan Layanan Bimbingan Jemaah haji	2.607.638.000	163	Org	100
5.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	5.046.407.000			
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.639.913.000	1 lay	Keg	100
	B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	633.896.000	12	lay	100
	C. Layanan Perkantoran	2.772.598.000	1	lay	100

Tabel 5
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Bimbingan Masyarakat Katolik

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
VI. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK/ MENINGKATNYA KUALITAS MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	3.844.362.000			
6.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		2.011.959.000			
	A. Guru Non PNS Penerima Insentif	12.000.000	48	org	100
	B. Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.739.559.000	264	org	100
	C. Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	240.400.000	35	Org	100

	D. KKG/MGMP Katolik yang Menerima Bantuan	20.000.000	1	Lok	100
6.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		592.500.000			
	A. Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	480.000.000	40	Org	100
	B. Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	20.000.000	1	Keg	100
	C. Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	77.500.000	2	lbg	100
	D. Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	15.000.000	1	Kel	100
	E. Layanan Perkantoran	500.635.000	12	lay	100
6.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		739.268.000			
	A. Layanan Perkantoran	739.268.000	12	lay	100

Tabel 6
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Bimbingan Masyarakat Kristen

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
VII. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	5.347.140.000			
7.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		1.876.600.000			
	A. PIP SMTK/SMK	56.000.000	56	Org	100

	B. PIP SDTK	36.000.000	80	Org	100
	C. Siswa SMTK Penerima BOS	112.000.000	80	Org	100
	D. Siswa SMP TK Penerima BOS	33.000.000	33	Org	100
	E. Siswa SDTK Penerima BOS	160.000.000	200	Org	100
	F. Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.323.600.000	49	Org	100
	G. Guru Non PNS Penerima Insentif	96.000.000	32	Org	100
	H. Guru yang memperoleh peningkatan kompetensi dan pembinaan	60.000.000	20	Org	100
7.2	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	814.040.000			
	A. Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat	100.000.000	10	unit	100
	B. Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	24.040.000	1	Lok	100
	C. Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	630.000.000	105	Org	100
	D. Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	60.000.000	50	Org	100
7.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bimas Kristen	263.480.000			
	A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	9.720.000	1	Layanan	100
	B. Layanan Perkantoran	253.760.000	1	Layanan	100
7.4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	2.393.020.000			
	Layanan Perkantoran	2.393.020.000	1	Layanan	100

Tabel 7
 Penetapan Kinerja Tahun 2020
 Program Bimbingan Masyarakat Hindu

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU/ DAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN HINDU	3.140.733.000			
8.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		572.876.000			
	Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	126.720.000	4	Org	100
	Guru Non PNS Penerima Insentif	165.000.000	5	Org	100
	Peningkatan Kompetensi Guru	150.931.000	100	Org	100
	Penjaminan Mutu Sekolah Minggu/Pasraman	130.225.000	7	Lmbg	100
8.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		755.602.000			
	Peningkatan Kompetensi Penyuluh	65.022.000	50	Org	100
	Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	600.000.000	50	Org	100
	Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih	63.625.000	3	Lks	100

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	21.375.000	4	Lmbg	100
Bimbingan Keluarga Sukinah	5.580.000	30	Org	100
8.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Bimas Hindu	160.184.000			
Layanan Perkantoran	160.184.000	1	Lay	100
8.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	1.652.071.000			
A.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	85.000.000	1	Lay	100
B.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28.500.000	1	Lay	100
C.Layanan Perkantoran	1.538.571.000	1	Lay	100

Tabel 8
Penetapan Kinerja Tahun 2020
Program Bimbingan Masyarakat Buddha

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%
IX. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA DAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	10.939.345.000			
		1.667.500.000			
9.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha		8.250.000	2	Keg	100
	A,Umat Buddha yang Terbina				

B. Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	1.512.000.000	126	Org	100
C. Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	75.000.000	1	Lok	100
D. Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	72.250.000	2	Keg	100
9.2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	159.500.000			
Layanan Perkantoran	159.500.000	1	Layanan	100
9.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4.329.250.000			
A. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1.650.000	5	Org	100
B. Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	267.140.000	302	Org	100
C. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	364.350.000	120	Org	100
D. Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi	1.032.000.000	35	Org	100
E. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan	2.100.000.000	2	Lmbg	100
F. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana	152.510.000	10	Lks	100
G. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional	255.000.000	14	Lks	100
H. Bantuan Subsidi Upah (BSU)	156.600.000	87	Org	100

9.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha		4.783,095.000			
	A. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	103.400.000	1	Layanan	100
	B. Layanan Perkantoran	4.679.695.000	12	Layanan	100

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur penentu keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional setiap lembaga atau instansi pemerintah sehingga setiap satuan kerja wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur dengan tujuan penting dalam penetapan dan penerapan sebuah Indikator Kinerja Utama adalah untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari setiap unit organisasi yang ada seperti Bagian Tata Usaha, Para Bidang, Para Pembimas dan Seluruh Kankemenag Kab./Kota yang ada di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang nantinya ukuran tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan capaian kinerja serta akuntabilitas hasil kinerja.

Dalam penyusunannya IKU Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sudah memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya adalah 1. *Spesifik*, yang mengacu kepada hal yang akan diukur secara terperinci, 2. *Measurable*, dapat diukur secara objektif, 3. *Achievable*, data yang dipakai dalam IKU dapat dikumpulkan, 4. *Relevant*, IKU yang dibuat menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil, 5. *Timelines*, IKU yang telah disusun menggambarkan perkembangan kinerja, namun demikian IKU yang dipakai lebih fleksibel jika ada sejumlah perubahan di dalamnya. Diantara IKU yang telah di susun ini mengacu secara langsung kepada IKU Menteri Agama Republik Indonesia dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 9
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENAG	INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT PROVINSI	VARIABEL/INDIKATOR	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama	Indeks Kesehalehan Sosial	1. Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah	1. Pengetahuan 2. Sikap 3. Perilaku	Pengumpulan data	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
			2. Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan				
2	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	1. Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama	Jumlah konflik antar umat beragama	Pengumpulan data	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota Hasil Survei Balit bang dan Diklat
			2. Indeks KUB Tingkat Provinsi				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	1. Indeks layanan keagamaan (jenis layanan khusus di masing-masing agama)	1. Jumlah sarana rumah ibadah yang memenuhi standar	1. Sarana Prasarana Ibadah 2. Penyuluh Agama 3. Kitab Suci 4. Lembaga Sosial Keagamaan	Pengumpulan data	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
			2. Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi				
			1. Jumlah KUA yang memenuhi standar				
			2. Jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi				
			Alat ukur sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14/2017:				
3. Indeks kepuasan layanan jaminan, perlindungan dan pengawasan produk halal	Variabel 1. Jaminan pelayanan 2. Perlindungan 3. Pengawasan	Pengumpulan data	BPJPH	BPJPH			
4. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji	BPS	Survei	Ditjen PHU	Survei BPS	
5. Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri	Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi	Pendaftaran, Keberangkatan, dan Kepulangan	Survei	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Hasil Penelitian Balitbang dan Diklat	

4	Meningkatnya akses layanan pendidikan	1. APK RA/ Pratama Widya Pasraman	APK RA/ Prtama Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa RA/ Prtama Widya Pasraman	Jumlah siswa RA/ Prtama Widya Pasraman	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah penduduk usia 4 sd 6 tahun	Jumlah penduduk usia 4 s.d. 6 Tahun		
		2. APK MI/ Uia/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	APK MI/ Uia/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa MI/Uia/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Jumlah siswa MI/Uia/SDTK/Adhi Widya Pasraman	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah penduduk usia 7 sd 12 Tahun	Jumlah penduduk usia 7 s.d. 12 Tahun		
		3. APK MTs/ Wustha/ SMP TK/ Madyama Widya Pasraman	APK MTs/ Wustha/ SMP TK/ Madyama Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMP TK/ Madyama Widya Pasraman	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMP TK/ Madyama Widya Pasraman	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah penduduk usia 13 sd 15 Tahun	Jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 Tahun		
		4. APK MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman	APK MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	Jumlah siswa RA/ Prtama Widya Pasama	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 Tahun	Jumlah penduduk usia 16 s.d. 18 Tahun		
		5. APM MI/ Uia/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	APM MI/ Uia/ SDTK/ Adhi Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa MI/Uia/SDTK/Adhi Widya Pasramana yang berusia 7 s.d. 12 tahun	Jumlah siswa MI/ Uia/ SDTK/ Adhi Widya Pasramana yang berusia 7 s.d. 12 tahun	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun	Jumlah Penduduk Usia 7 s.d. 12 tahun		
		6. APM MTs/Wustha/SMP TK	APM MTs/Wustha/SMP TK	1.	Jumlah siswa MTs/Wustha/SMP TK yang berusia 13 s.d. 15 tahun	Jumlah siswa MTs/ Wustha/ SMP TK yang berusia 13 s.d. 15 tahun	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah Penduduk Usia 13 s.d. 15 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 13 s.d. 15 tahun		

	7.	APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman	APM MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman	1.	Jumlah siswa MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d. 18 tahun	Jumlah siswa MA/ Ulya/ Utama Widya Pasraman yang berusia 16 s.d. 18 tahun	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah Penduduk Usia 16 s.d. 18 Tahun	Jumlah Penduduk Usia 16 s.d. 18 tahun		
5	8.	APK PTK/Ma'had Aly/PTK	APK PTK/Ma'had Aly/PTK	1.	Jumlah siswa PTK/Ma'had Aly/PTK	Jumlah siswa PTK/Ma'had Aly/PTK	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah penduduk usia 19 s.d. 23 Tahun	Jumlah penduduk usia 19 s.d. 23 Tahun		
				1.	Jumlah siswa yang mengikuti ujian MTS	Jumlah nilai ujian MTS		
				2.	Jumlah nilai ujian MTS	Jumlah siswa yang mengikuti ujian MTS		
5	1.	Rerata nilai ujian sekolah MTS	Rerata nilai ujian sekolah MTS	1.	Jumlah siswa yang mengikuti ujian MA	Jumlah nilai ujian MA	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Kanwil, Kemenag Kab/ Kota
				2.	Jumlah nilai ujian MA	Jumlah siswa yang mengikuti ujian MA		
				1.	Kejujuran	1. Pengukuran Pengetahuan (Gutman Skala : 0 -10)		
				2.	Dapat Dipercaya	1. Pengukuran Pengetahuan (Gutman Skala : 0 -10)		
				3.	Tanggungjawab	2. Sikap (Thurstone Skala 1-10)		
				5.	Keadilan	3. Tindakan (Linkert Skala 1-4)		
6	1.	Prediket Akuntabilitas Kinerja	Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Komponen Penilaian Akuntabilitas Kinerja			Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Hasil Audit Kinerja Instansi
				Jumlah Saker yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan				
6	2.	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan	% Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/ Pemeriksaan	Laporan Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut			Kanwil, Kemenag Kab/ Kota	Aparat Pengawasan Internal/ Eksternal
				Jumlah Saker yang telah menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan				

E. Perjanjian Kinerja (Perkin)

Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja dan rencana kerja jangka pendek pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang langsung disaksikan dan diketahui oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia pada saat pelaksanaan Rakornas Kementerian Agama RI di Jakarta.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Berbasis Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing program kegiatan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah dapat menyelesaikan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja tahun 2020. Secara implisit capaian kinerja dapat tergambar pada pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya atau yang disebut dengan pengukuran kinerja, sebagaimana telah di uraikan di atas.

Capaian Kinerja merupakan bentuk kegiatan pemantauan perkembangan kinerja secara periodik yang bermanfaat dalam memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis, tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran kegiatan-kegiatan triwulanan yang telah ditetapkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 ini terbagi dalam 2 bagian penyajian, yang pertama capaian kinerja yang berafiliasi pada perjanjian kinerja tahun 2020 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan yang kedua capaian kinerja yang berafiliasi pada perjanjian kinerja dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Capaian Kinerja
Program Sekretariat dan KUB Tahun 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	JML	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran Rp.	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA	MENINGKATKANNYA KUALITAS TATA KELOLA DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA	10.910.519.000			100	10.833.326.979	99,29	77.192.021	
1.1 Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN									
	Meningkatnya Layanan perkatoran	6.192.074.000	1	Layanan	100	6.134.302.869	99,07	57.771,131	
1.2 Pembinaan Administrasi Perencanaan									
	Meningkatnya Layanan Administrasi Perencanaan	150.000.000	1	Layanan	100	149.550.000	99,70	450.000	
1.3 Pembinaan Administrasi Umum		4.568.445.000							
	A.Meningkatnya Layanan sarana dan prasarana	50.000.000	1	Layanan	100	49.500.000	99,00	500.000	
	B.Meningkatnya Layanan Perkatoran	4.518.445.000	1	Layanan	100	4.499.670,074	99,58	18.774,926	
2. PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA		447.049.000							
2.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Umat Khonghucu		300.000.000				300.000.000	100,00	00	

	Penyuluh honoror	300.000.000	25	Org	100				
2.2	Meningkatnya Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	102.049.000				101,683,000	99,64	366,000	
	A. Meningkatkan Pengembangan Kerukunan Hidup Umat Beragama	20.000.000	2	Layanan	100	20.000.000	100	00	
	B. Meningkatkan Kualitas Mutu Layanan Operasional Sekber FKUB Provinsi	50.000.000	1	Lok	100	50.000.000	100	00	
	C. Meningkatkan Kualitas Mutu Layanan Desa Sadar Kerukunan	30.000.000	1	Lok	100	30.000.000	100	00	
	D. Meningkatkan Kualitas Mutu Layanan Dukungan Manajemen Satker	2.049.000	1	Thn	100	1.683.000	99,64	366,000	
2.3	Meningkatnya Pembinaan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	45.000.000				45,000,000	100,00	00	
	. Meningkatkan guru agama khonghucu penerima insentif	45.000.000	15	Org	100	45,000,000	100,00	00	

TABEL 14
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA BIMAS ISLAM TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ SASARAN STRATEGIS/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA			REALISASI CAPAIAN KINERJA							
		Anggaran Rp.	J ml	@ %	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran					
III. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	MENINGKATNYA KUALITAS BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM/PELAYANAN KEAGAMAAN DAN KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA	1.890.100.000		100	1.842.946.000	97,51	47.154.000					
					3.1 Pengelolan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah							
					A. Meningkatnya Kualitas Penghulu yang terbina	145.000.000	1	Org	100	139.538.000	96,24	5.462.000
					B. Meningkatnya Kualitas Mutu dan Layanan KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	293.100.000	4	lok	100	280.887.000	95,84	12.213.000
					C. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Keluarga Sakinah yang Terbina	175.000.000	1	Pasang an	100	149.677.000	85,53	25.323.000
					D. Meningkatnya Layanan Pembagunan gedung Balai Nikah	48.000.000	1	Lok	100	47.550.000	99,07	450.000
	E. Meningkatnya Layanan Bimbingan perkawinan pra Nikah	179.000.000	2	Org	100	177.480.000	99,15	1.520.000				
	F. Rehabilitasi KUA	750.000.000	5	Lok	100	747.823.000	99,71	2.177.000				

	G. Sarana dan Prasarana KUA	300.000.000	25	Lok	100	300.000.000	100	
3.2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	235.496.000				231.996.000	98,51	3.500.000
	A. Meningkatkan Kualitas lembaga agama yang mendapatkan pembinaan Manajemen ekonomi umat	56.000.000	1	lbg	100	55.574.000	99,24	426.000
	B. Literasi Perekonomian dan keuangan syariah	5.472.000	1	org	100	5.472.000	100	00
	C. Pengembangan kemitraan ekonomi umat	85.000.000	1	lok	100	82.300.000	96,83	2.700.000
	D. Meningkatkan Kualitas Lembaga Zakat yang terakreditasi	8.000.000	8	lbg	100	8.000.000	100	00
	E. Meningkatkan kualitas pengamanan asset wakaf	40.000.000	1	lok	100	39.800.000	99,50	200.000
	F. Legalitas taah wakaf	41.024.000	35	Lok	100	40.850.000	99,58	174.000
3.3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	919.100.000				914.576.000	99,51	4.524.000
	A. Meningkatkan Kualitas Penyuluh Agama Islam yang berkualitas	105.100.000	47	org	100	104.300.000	99,24	800.000
	B. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Prestasi MTQ/STQ dan Al-Hadits	85.000.000	2	Keg	100	83.226.000	97,92	1.774.000
	C. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Dakwah dan Harbesar Islam	10.000.000	1	Keg	100	9.000.000	90,00	1.000.000

	D. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Ormas dan Lembaga Keagamaan	719.000.000	14	lbg	100	717.050.000	99,73	1.950.000	
3.4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	219.000.000				205.060.000	93,63	13.940.000	
	A. Meningkatkan kualitas mutu dan Layanan Syariah	9.000.000	1	Keg	100	0	00	9.000.000	
	B. Meningkatkan Kualitas Layanan Hisab dan Rukyat	160.000.000	1	Keg	100	155.060.000	96,88	4.940.000	
	C. Pembinaan Paham keagamaan	10.000.000	1	Keg	100	10.000.000	100	00	
	D. Meningkatkan Kualitas Mutu dan Layanan Direktori Pustaka Islam	40.000.000	1	unit	100	40.000.000	100	00	
3.5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	5.274.545.000				4.461.149,250	84,58	813.395,750	
	Terlaksananya Dukungan Manajemen eselon 1	250.000.000	1	Keg	100	250.000.000	100	00	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	50.000.000	1	Layanan	100	49.800.000	99,60	200.000	
	Layanan Perkantoran	4.974.545.000	1	Layanan	100	4.173.654.423	83,90	800.890.577	

TABEL 15
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran	
IV. PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM	MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN ISLAM/MENINGKATKAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	116.560.802.000				114.162.025.686		2.398.776.314	
4.1 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam		151.000.000				150.650.000	99,77	350.000	
	A. Meningkatkan Mutu dan Layanan Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam	73.000.000	1	Keg	100	72.950.000	99,94	50.000	
	B. Meningkatkan Mutu dan Layanan Guru PAI yang meningkat kompetensinya	78.000.000	80	org	100	77.700.000	99,62	300.000	
4.2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam		13.428.000.000				11.373.460.000	84,70	2.054.540.000	
	A. Dokumen Standar Nasional Pendidikan Keagamaan Islam	75.000.000	1	Keg	100	74.250.000	99,00	750.000	
	B. Guru/Ustadz Pendidikan Keagamaan Islam Penerima Tunjangan Insentif	1.032.000.000	224	org	100	1.032.000.000	100	0	
	C. Madrasah Diriyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	464.000.000	80	lbg	100	463.810.000	99,96	190.000	

	D. Santti Pendidikan diniyah formal/mudalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	1.444.500.000	3.210	org	100	1.402.650.000	97,10	41.850.000
	E. Santti Pendidikan diniyah formal/mudalah/PPS Tk. Mustha penerima bantuan PIP	9.202.500.000	12.270	org	100	7.251.750.000	78,81	1.950.750.000
	F. Santti Pendidikan diniyah formal/mudalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	1.210.000.000	1.210	org	100	1.149.000.000	94,96	61.000.000
4.2 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah		95.669.600.000				95.667.400.004	99,99	2.199.996
	A. Madrasah dan RA yang Terakreditasi	10.000.000	15	lbg	100	10.000.000	100	0
	B. Dokumen Standar Nasional Pendidikan	173.570.000	1	lbg	100	173.220.000	99,80	350.000
	C. Siswa MTs penerima BOS	600.000	2.342	Keg	100	0		600.000
	D. Siswa MA penerima BOS	72.087.000.000	52.515	org	100	72.086.550.004	99,99	449.996
	E. BOP RA	23.346.000.000	58.365	Org	100	23.345.800.000	99,99	200.000
	F. Layanan Dukungan Manajemen Satker	52.430.000	1	Lay	100	51.830.000	98,86	600.000

4.3 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah		816.036.000					632.706.000	77,54	183.330.000
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Yang Dinilai Kinerjanya	30.000.000	10	org	100	30.000.000	100	0	
	Guru Madrasah dan RA yang tersertifikasi (PPG/PLPG)	78.906.000	1	Keg	100	78.906.000	100	0	
	Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Khusus	707.130.000	97	Keg	100	523.800.000	74,08	183.330.000	
4.3 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam		6.496.166.000				6.337.809.682	97,57	158.356.318	
	A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	509.995.000	1	lay	100	508.253.000	99,66	1.742.000	
	B. Layanan Perkantoran	5.986.171.000	2	Keg	100	5.829.556.682	97,39	156.614.318	

TABEL 16
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran	
V. PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEAGAMAAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN HAJI DAN UMRAH	8.195.092.000				8.081.501.168	98,62	113.590.832	
5.1 Pelayanan Haji Dalam Negeri		185.982.000				185.885.000	99,95	97.000	
	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	185.982.000	9.745	org	100	185.885.000	99,95	97.000	
5.2 Pembinaan Haji		2.637.298.000				2.634.519.700	99,96	2.778.300	
	A. Meningkatkan Mutu dan Layanan Petugas Haji yang Profesional	29.660.000	60	org	100	29.660.000	100	0	
	B. Meningkatkan Mutu dan Layanan Bimbingan Jemaah haji	2.607.638.000	163	Org	100	2.604.859.700	99,90	2.778.300	
5.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah		5.046.407.000							
	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.639.913.000	1 lay	Keg	100	1.603.506.223	97,78	36.406.777	

	B. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	633.896.000	12	lay	100	630.276.450	99,43	3.619.550
	C. Layanan Perkantoran	2.772.598.000	1	lay	100	2.772.598.000	100	0

TABEL 17
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp	%	sisa anggaran
VI. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	MENINGKATKANNYA KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK/MENINGKATKANNYA KUALITAS MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	3.844.362.000				3.479.026.420	90,50	365.335.580
6.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik		2.011.959.000				1.900.888.000	94,48	111.071.000
	A. Guru Non PNS Penerima Insentif	12.000.000	48	org	100	9.000.000	75,00	3.000.000
	B. Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.739.559.000	264	org	100	1.631.988.000	93,82	107.571.000
	C. Guru Pendidikan Agama Katolik yang Meningkatkan Kompetensinya	240.400.000	35	Org	100	239.900.000	99,80	500.000
	D. KKG/MGP Katolik yang Menerima Bantuan	20.000.000	1	Lok	100	20.000.000	100	0
6.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik		592.500.000				391.710.000	66,11	200.790.000
	A. Penyuluh Agama Katolik Non PNS Penerima Tunjangan	480.000.000	40	Org	100	280.000.000	58,34	200.000.000

	B. Dialog Kerukunan Intern Umat Beragama Katolik	20.000.000	1	Keg	100	20.000.000	100	0
	C. Lembaga Keagamaan Katolik yang Difasilitasi	77.500.000	2	lbg	100	76.710.000	98,98	790.000
	D. Pemberdayaan Kelompok Kategorial Katolik	15.000.000	1	Kel	100	15.000.000	100	0
	E. Layanan Perkantoran	500.635.000	12	lay	100	503.042.808	100,48	(2.407.808)
6.3 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik		739.268.000	12	lay	100	683.385.612	92,44	55.882.388
	A. Layanan Perkantoran	739.268.000	12	lay	100	683.385.612	92,44	55.882.388

TABEL 18
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran Rp.	
VII. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	5.347.140.000				5.193.286.087	97,13	153.853.913	
7.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen		1.876.600.000				1.807.049.725	96,30	69.550.275	
	A.PIP SMTK/SMK	56.000.000	56	Org	100	54.000.000	96,43	2.000.000	
	B.PIP SDTK	36.000.000	80	Org	100	19.350.000	53,75	16.650.000	
	C.Siswa SMTK Penerima BOS	112.000.000	80	Org	100	112.000.000	100	0	
	D.Siswa SMPK Penerima BOS	33.000.000	33	Org	100	33.000.000	100	0	
	E.Siswa SDTK Penerima BOS	160.000.000	200	Org	100	109.600.000	68,50	50.400.000	

	F. Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	1.323.600.000	49	Org	100	1.323.403.725	99,99	196.275
	G. Guru Non PNS Penerima Insentif	96.000.000	32	Org	100	96.000.000	100	0
	H. Guru yang memperoleh peningkatan Kompetensi dan Pembinaan	60.000.000	20	Org	100	59.696.000	99,49	304.000
7.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen		814.040.000				813.905.000		135.000
	A. Rumah Ibadah Agama Kristen yang Bersih dan Sehat	100.000.000	10	unit	100	100.000.000	100	0
	B. Dialog Kerukunan Intern Umat Kristen	24.040.000	1	Lok	100	23.905.000	99,44	135.000
	C. Penyuluh Agama Kristen Non PNS penerima Tunjangan	630.000.000	105	Org	100	630.000.000	100	0
	D. Pembinaan Penyuluh Agama Kristen	60.000.000	50	Org	100	60.000.000	100	0
7.3 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Birnas Kristen		263.480.000				263.006.300	99,82	473.700
	A. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	9.720.000	1	Layanan	100	9.720.000	100	0

B.Layanan Perkantoran	253.760.000	1	Layanan	100	253.366.300	99,85	393.700
7.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	2.393.020.000				2.309.325.062		83.694.938
Layanan Perkantoran	2.393.020.000	1	Layanan	100	2.309.325.062	96,51	83.694.938

TABEL 19
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa Anggaran Rp	
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU/ DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	3.140.733.000				3.057.587.289	97,36	83.145.711	
8.1 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu		572.876.000				553.987.560	96,71	18.888.440	
	Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi	126.720.000	4	Org	100	116.264.400	91,75	10.455.600	
	Guru Non PNS Penerima Insentif	165.000.000	5	Org	100	165.000.000	100	0	
	Peningkatan Kompetensi Guru	150.931.000	100	Org	100	143.887.960	95,34	7.043.040	
	Penjaminan Mutu Sekolah Minggu/Pasraman	130.225.000	7	Lmb g	100	128.835.200	98,94	1.389.800	
8.2 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu		755.602.000				751.903.000	99,51	3.699.000	

	Peningkatan Kompetensi Penyuluh	65.022.000	50	Org	100	61.323.000	94,32	3.699.000
	Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS	600.000.000	50	Org	100	600.000.000	100	0
	Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih	63.625.000	3	Lks	100	63.625.000	100	0
	Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan	21.375.000	4	Lmbg	100	21.375.000	100	0
	Bimbingan Keluarga Sukinah	5.580.000	30	Org	100	5.580.000	100	0
8.3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Birnas Hindu	160.184.000				153.104.650	95,58	7.079.350
	Layanan Perkantoran	160.184.000	1	Lay	100	153.104.650	95,58	7.079.350
8.4	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Birnas Hindu	1.652.071.000				1.598.592.079	96,59	53.478.921
	A.Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	85.000.000	1	Lay	100	84.098.500	98,94	901.500
	B.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	28.500.000	1	Lay	100	28.450.000	99,99	50.000

TABEL 20
CAPAIAN KINERJA
SATUAN KERJA BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA TAHUN 2020

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN SATRATEGIS / SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA				REALISASI CAPAIAN KINERJA			
		Anggaran Rp.	Jml	@	%	Anggaran Rp.	%	Sisa anggaran Rp.	
IX. PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA DAN MENINGKATNYA MUTU PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN	10.939.345.000				10.759.960.658	98,36	179.384.342	
		9.1 Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha		1.667.500.000			1.667.200.000	99,99	300.000
		A. Umat Buddha yang Terbina	8.250.000	2	Keg	100	8.250.000	100	0
		B. Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan	1.512.000.000	126	Org	100	1.512.000.000	100	0
	C. Bantuan Lembaga Agama dan Keagamaan Buddha	75.000.000	1	Lok	100	75.000.000	100	0	
	D. Dialog Kerukunan Intern Umat Buddha	72.250.000	2	Keg	100	71.950.000	99,59	300.000	
9.2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha		159.500.000				157.218.000	98,57	2.282.000	

Layanan Perkantoran	159.500.000	1	Layanan	100	157.218.000	98,57	2.282.000
9.3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	4.329.250.000				4.158.707.800	96,06	170.542.200
A. Tenaga Pendidik dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang ditingkatkan kompetensinya	1.650.000	5	Org	100	1.650.000	100	0
B. Peserta Didik yang mendapatkan Pembinaan Karakter	267.140.000	302	Org	100	266.240.000	99,67	900.000
C. Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insentif	364.350.000	120	Org	100	364.350.000	100	0
D. Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi	1.032.000.000	35	Org	100	865.957.800	83,91	166.042.200
E. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Rehab/ Renov/ Pembangunan	2.100.000.000	2	Lmbg	100	2.100.000.000	100	0
F. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Sarana dan Prasarana	152.510.000	10	Lks	100	152.510.000	100	0
G. Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional	255.000.000	14	Lks	100	255.000.000	100	0
H. Bantuan Subsidi Upah (BSU)	156.600.000	87	Org	100	153.000.000	97,71	3.600.000

9.4 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha		4.783.095.000				4.776.834.858	99,87	6.260.142	
	A.Layanan Sarana dan Prasarana Internal	103.400.000	1	Layanan	100	102.991.200	99,61	408.800	
	B.Layanan Perkantoran	4.679.695.000	12	Layanan	100	4.673.843.658	99,88	5.851.342	

H. Perbandingan dan Analisis Capaian Anggaran 2019 dan 2020

TABEL 23
PERBANDINGAN CAPAIAN ANGGARAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019 DAN 2020

NO.	PROGRAM	2019			2020		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
1	DUKUNGAN MANAJEMEN	16.513.542.000	16.230.698.472	98,29	11.357.568.000	11.279.705.943	99,31
2	BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	17.824.360.000	16.969.006.096	95,20	8.538.241.000	7.655.727.250	89,66
3	PENDIDIKAN ISLAM	121.781.803.000	119.048.860.315	97,76	116.560.802.000	112.624.222.778	96,62
4	BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	6.781.943.000	6.466.687.064	95,35	5.347.140.000	5.186.648.087	97,00
5	BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	4.436.575.000	4.073.490.917	91,82	3.844.362.000	3.479.026.420	90,50
6	BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	4.310.259.000	4.141.460.544	96,08	3.140.733.000	3.056.308.669	97,31
7	BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	11.716.284.000	11.499.531.820	98,15	10.939.345.000	10.758.250.658	98,34
8	PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	5.016.045.000	4.991.300.029	99,51	8.195.092.000	8.081.501.168	98,61
JUMLAH TOTAL		188.380.811.000	183.421.035.257	96,52	167.923.283.000	162.121.390.973	95,92

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Sasaran strategis pertama yang sudah ditetapkan berdasarkan surat Biro Perencanaan Kementerian Agama RI belum terakomodir secara anggarannya dalam RKAK/L atau DIPA Kementerian Agama sehingga untuk menetapkan program yang berkaitan dan berkenaan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) terjadi kendala adanya refokucing anggaran covid 19 dan tidak adanya pemberangkatan jemaah haji, diantara IKU yang tidak terakomodir secara anggaran adalah;
 - a. Jumlah umat beragama yang aktif pada rumah ibadah;
 - b. Jumlah Rumah Ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.
2. Singkronisasi visi dan misi, serta rencana strategis dengan rencana kerja tahun 2020 yang ditetapkan dalam bentuk kinerja, perlu lebih diarahkan terhadap pencapaian Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, yaitu Terwujudnya Masyarakat Banten Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir Batin Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong;
3. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten pada tahun 2020 rata-rata berkisar 79.96%;
4. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2019 yaitu sekitar 77.72%, maka kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup baik yakni sebesar 2.24%;
5. Capaian realisasi anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 sebesar 95.92%.

6. Jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada tahun 2019 yaitu sekitar 96.52%, maka kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tahun 2020 mengalami penurunan yakni sebesar 0.60%.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2019, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten pada tahun 2020 dapat dinilai "baik" tentunya dalam kerangka laporan yang akuntabilitas kinerja. Keberhasil ini tentu saja tidak dilihat dari sudut pandang angka-angka saja, namun keberhasilan ini merupakan suatu bentuk kerja nyata dan keseriusan seluruh elemen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam mengemban amanah.

Namun dalam capaian realisasi serapan anggaran pada tahun 2020 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten masih terjadi beberapa revisi karena menyesuaikan dengan program pusat sebagai pengaruh dari terjadinya perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Agama sehingga di ujung tahun anggaran masih ada pengusulan revisi-revisi anggaran.

B. Saran

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2020 ini masih membutuhkan upaya perbaikan dan pembenahan dari beberapa program kegiatan. Untuk itu perlu disampaikan beberapa saran-saran:

1. Perlu dilakukan evaluasi sinkronisasi program kerja dari mulai pusat hingga daerah tingkat II pada tahun 2020 dengan Visi dan Misi yang berubah sesuai RPJM 2020-2024 yang telah ditetapkan, agar rencana kerja tahun 2020 menuju ke arah perwujudan "Masyarakat Banten Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dapat terealisasi dengan baik dan minim hambatan/kendala.

2. Perubahan nomenklatur baru PMA nomor 19 tahun 2019 dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kompetensi dan penempatan pegawai secara proporsional agar mampu melahirkan program-program dan rencanan tahunan yang lebih berpotensi, tepat sasaran dan tepat waktu dalam menyelesaikan laporan sehingga dapat mewujudkan " Masyarakat Banten Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Sejahtera Lahir Batin, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".
3. Peningkatan sarana prasarana aparatur yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan kerja, sehingga optimalisasi dan efisiensi kerja yang lebih optimal akan terwujud di masa yang akan datang.